

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring berjalannya waktu, setiap perusahaan dituntut untuk tidak hanya fokus pada keuntungan saja, namun juga pada permasalahan lingkungan dan sosial, karena permasalahan sosial dan lingkungan hidup selalu menjadi perhatian masyarakat. Para pemangku kepentingan menganggap pelaporan keberlanjutan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, namun motivasi mereka dalam menyampaikan laporan berbeda-beda. Hal ini bisa disebabkan oleh kesadaran diri, permasalahan lingkungan, dan permasalahan komunitas (Maryana & Carolina, 2021).

Pelaporan keberlanjutan merupakan jenis pelaporan sukarela sebagai pernyataan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pelaporan keberlanjutan diperlukan bagi para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat untuk menyadari segala bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Diantaranya adalah laporan keuangan, laporan CSR, atau laporan keberlanjutan sebagai penilaian awal terhadap kredibilitas suatu perusahaan. Laporan keberlanjutan yang diakui secara internasional mengacu pada *Global Reporting Initiative* (GRI) atau Inisiatif Pelaporan (Megawati, 2021).

Pelaporan keberlanjutan dianggap penting bagi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan seluruh pihak yang berkepentingan. Dengan mengungkapkan laporan keberlanjutan perusahaan dapat meningkatkan transparansi dan meningkatkan citra perusahaan (Orazalin & Mahmood, 2018).

Pelaporan keberlanjutan atau yang biasa disebut dengan *Sustainability Report* pertama kali diperkenalkan pada tahun 1997 oleh *Global Reporting Initiative* (GRI). GRI (2016) mendefinisikan pelaporan keberlanjutan sebagai pelaporan yang mengikuti konsep *three bottom lines* atau 3P yakni, *Profit, Planet, dan People*. Adanya prinsip 3P ini menjadi fondasi utama perusahaan, sehingga dalam menjalankan bisnis tidak hanya mengincar keuntungan saja namun juga lebih mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Sejak diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.51 Tahun 2017, publikasi laporan keberlanjutan menjadi hal yang wajib bagi perusahaan jasa keuangan, emiten dan perusahaan tercatat. Jumlah perusahaan yang sudah menerbitkan laporan keberlanjutan setelah diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2018 adalah 58 perusahaan dari 619 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Lalu, pada tahun 2019 menjadi 94 perusahaan dari 668 perusahaan. Dan pada tahun 2020 menjadi 140 perusahaan dari 713 perusahaan yang terdaftar di BEI (Annisatulfitria, 2023). Namun, setelah diterbitkan PJOK yang mewajibkan perusahaan menerbitkan laporan keberlanjutannya ternyata menunjukkan bahwa di Indonesia masih terdapat kesenjangan antara jumlah perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan dengan jumlah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa masih minim kesadaran perusahaan dalam mementingkan laporan keberlanjutan (Suratman et al., 2023).

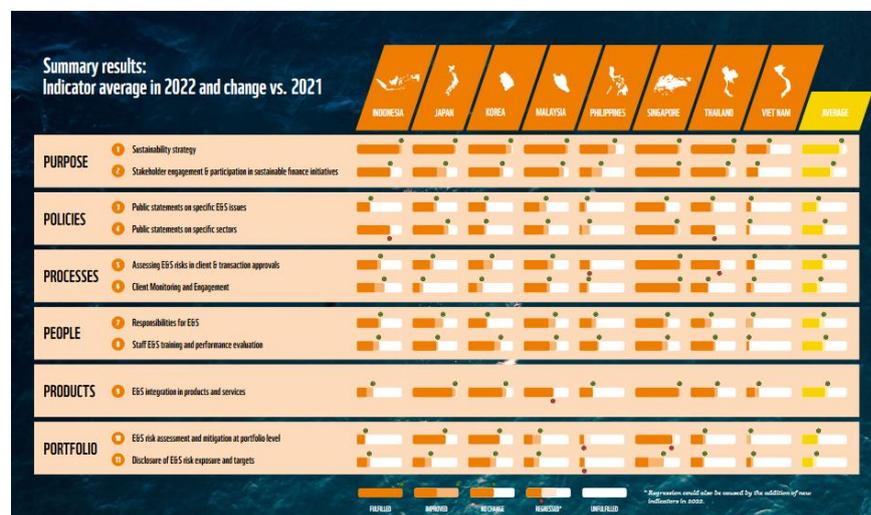
Oleh karena itu, diperlukan salah satu jenis perusahaan yang dapat menjadi pendorong perusahaan lain untuk berpartisipasi dalam memelihara aspek

lingkungan dan sosial dan mempublikasikannya dalam laporan keberlanjutan mereka. Salah satu perusahaan tersebut yaitu perusahaan dalam sektor perbankan. Karena pada tahun 2020 sektor pertama yang diwajibkan mengungkapkan laporan keberlanjutan adalah sektor perbankan. Sektor perbankan merupakan perusahaan yang paling banyak menerapkan standard dalam laporan keberlanjutan sebesar 33% dibandingkan sektor lainnya (Farhana & Adelina, 2019).

Tekanan global memaksa sektor perbankan untuk lebih proaktif dalam menjamin keberlanjutan perusahaannya baik dari aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Saat merespons isu keberlanjutan, bank menerapkan berbagai strategi yang dipengaruhi oleh motif ekonomi, sosial, dan lingkungan (Zimmermann, 2019). Sektor perbankan berkontribusi terhadap aktivitas perekonomian dan upaya pembangunan suatu negara dengan mendanai berbagai sektor ekonomi dan proyek yang terlibat dalam produksi barang dan jasa. Kegiatan produksi dan pembangunan itu merupakan kegiatan yang penting namun memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Pembangunan ekonomi bergantung pada sektor perbankan, namun sebagai penyedia pembiayaan bagi perusahaan, sektor ini tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas dampak negatifnya (Siddique et al., 2023).

Dikutip dari *World Wide Fund of Nature (WWF) Singapore Sustainable Banking assessment 2022*, yang menilai kemajuan bank-bank di ASEAN, Jepang dan Korea dalam mengintegrasikan risiko lingkungan dan sosial ke dalam strategi, kebijakan dan proses. Menunjukkan bahwa 39% bank yang dinilai telah membuat komitmen untuk mencapai emisi nol yang dibiayai pada tahun 2050, meningkat pesat dari 15% pada tahun 2021. Namun masih ada kesenjangan yang melebar

antara bank-bank di Asia dalam mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dan sosial secara umum. Setengah dari bank-bank yang dinilai hanya membuat sedikit kemajuan pada tahun 2022 termasuk negara Indonesia. Rata-rata indikator SUSBA yang diterapkan bank di Indonesia hanya mengalami peningkatan yang sedikit dibandingkan bank-bank di Asia lainnya. Ini menunjukkan bahwa bank di Indonesia masih perlu melakukan peningkatan dalam menangani risiko lingkungan dan sosial.



Sumber: WWF-SUSBA *Assesment* 2022

Gambar 1. 1

Rata-rata indikator penerapan *Sustainability Banking* bank-bank di Asia

Dikutip dari cnbcindonesia.com, berdasarkan data dari Urgewald, beberapa bank nasional masih menyalurkan pembiayaan terhadap proyek-proyek Batubara, baik PLTU maupun pertambangan yang terdaftar pada *Global Coal Exit List* (GCEL) 2020, pada kurun waktu Oktober 2018 sampai Oktober 2020 dengan jumlah sebesar Rp89 triliun dan underwriting atau penjaminan emisi Rp16,6 triliun disalurkan enam bank nasional ke proyek energi batubara.

Tabel 1.1**Pinjaman perbankan nasional ke proyek batubara dalam miliar dolar**

Bank Nasional	Loans	Total Loans	
Bank Mandiri	2,466	59,194	4,16%
Bank Negara Indonesia	1,839	89,297	2,06%
Bank Rakyat Indonesia	1,762	168,233	1,05%
Bank Central Asia	82	106,530	0,77%
Bank Tabungan Negara	106	45,806	0,23%
Indonesia Eximbank	37	18,596	0,20%
Total	6,292	487,656	8,47%

Sumber: *cnbcindonesia.com*

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa yang paling banyak memberikan pembiayaan kredit ke proyek batubara yaitu Bank Mandiri sebesar 4,16% dari total portofolio kredit. Berikutnya ada PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) yang juga menyalurkan kredit ke proyek Batubara sebesar 2,06% dari total portofolio kredit. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) menyalurkan 1,05% porsi kredit untuk batubara dari total portofolio kredit, PT Bank Central Asia Tbk hanya menyalurkan 0,77% porsi kredit untuk proyek batubara dari total portofolio kredit. Selanjutnya Bank Tabungan Negara dan Indonesia Eximbank hanya menyalurkan 0,23% dan 0,20% porsi kredit untuk proyek batubara dari total portofolio kredit. Hal ini membuktikan bahwa walaupun presentasi pembiayaan kredit hanya sedikit dari total portofolio kredit, namun bank-bank masih menyalurkan kredit kepada proyek batubara yang dimana ini tidak sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.51 tahun 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan

yang mewajibkan bank untuk menerapkan keuangan berkelanjutan. Bank-bank nasional yang sudah berkomitmen dalam keuangan berkelanjutan ini menjadi penggerak pertama berkelanjutan yang menyatakan dalam laporan keberlanjutannya tidak lagi mendanai proyek berbahaya dan merusak lingkungan. Namun kenyataannya masih mengalirkan dana ke proyek-proyek Batubara, hal ini bertolak belakang dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.51 tahun 2017 yang mengharuskan sektor perbankan menjadi penggerak dalam mitigasi perubahan iklim dengan memberikan pendanaan ke sektor energi bersih dan berkelanjutan.

Sampai saat ini, sektor perbankan mengurangi pendanaan ke sektor batubara atau energi fosil untuk berkomitmen dalam mengatasi perubahan iklim. Mengutip dari cnbcindonesia.com, menurut *Institute for Essential Services Reform (IESR)* dalam laporannya yang berjudul “*Indonesia Sustainable Finance Outlook 2023*” sejauh ini hanya dua bank besar Indonesia yang mengumumkan mulai mengurangi penyaluran kredit ke sektor pertambangan. Berdasarkan kesepakatan dari total portofolio kredit, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) telah menghentikan pinjaman ke bahan bakar fosil sejak Mei tahun lalu dan selalu mempertahankan porsi kredit untuk sektor batubara di bawah 3%. Berdasarkan laporan keuangan triwulan pertama tahun 2023, porsi pinjaman sektor pertambangan sebesar 13,51 triliun, hanya 1,30% dari total portofolio pinjaman sebesar 1,302 triliun. Berikutnya ada PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) yang juga mengurangi penyaluran kredit ke sektor pertambangan. Hingga triwulan II tahun 2023, porsi kredit pada sektor pertambangan mencapai Rp38,9 triliun atau sebanding dengan 6,61% dari

total portofolio kredit. Presentase tersebut menurun menjadi 6,61% sejak akhir Desember 2022. IESR mencatat bahwa penyaluran keuangan ke sektor batubara mengalami tren penurunan sejak tahun 2018-2021. Namun selama periode tersebut, empat bank besar lainnya masih mengalokasikan dana sebesar Rp93,6 triliun ke sektor batubara.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sektor perbankan yang harusnya menjadi penggerak dalam mitigasi perubahan iklim dengan memberikan pendanaan ke sektor energi bersih dan berkelanjutan, namun pada kenyataannya masih menyalurkan kredit kepada sektor pertambangan. Maka dari itu sektor perbankan perlu membenahi kebijakannya dan menyesuaikan kebijakan dengan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perbankan seharusnya memberikan informasi implementasi kebijakan yang diambil seperti melakukan penyaringan pemberian kredit untuk mendukung pendanaan sektor ramah lingkungan dan informasi tersebut dapat dimasukkan dalam laporan keberlanjutannya (Oktaviani et al., 2023)

Perbankan wajib menyusun laporan keberlanjutan. Pengungkapan laporan keberlanjutan bertujuan untuk memberikan dampak positif terhadap kesehatan dan kelangsungan hidup bank agar menerapkan keuangan berkelanjutan. Laporan keberlanjutan adalah informasi perusahaan yang mencakup pelaporan keuangan, sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan untuk para pemangku kepentingan (Sorour et al., 2021).

Pengungkapan dalam pelaporan keuangan dan keberlanjutan merupakan hal yang penting dan dapat menentukan kepentingan masyarakat, karena digitalisasi perbankan harus didukung oleh kepercayaan masyarakat pengguna (Maryana &

Carolina, 2021). Dengan berkembangnya teknologi dan informasi saat ini telah mengubah aktivitas industri dari manual menjadi otomatis dan dari transaksi offline menjadi transaksi online, yang banyak memberikan dampak terhadap industri keuangan. Bank menanggapi fenomena ini dengan membuat perbankan digital, yang mendigitalkan seluruh transaksi dan layanan tradisional dalam aplikasi. Hal ini memungkinkan bank untuk mendigitalkan seluruh transaksi dan layanan tradisional dalam suatu aplikasi (Nguyen & Dang, 2018).

Digitalisasi juga tidak kalah pentingnya dan telah menjadi bagian dari dimensi keberlanjutan, terutama dalam rangka meningkatkan pelayanan yang didukung oleh fasilitas digital sehingga menjadi kebutuhan mutlak. Sesuai dengan peraturan yang diterbitkan OJK yaitu Peraturan Nomor 51/PJOK.03/2017, diharapkan sektor perbankan merespons dengan menerbitkan laporan keberlanjutan. berdasarkan seluruh aktivitas perusahaan yang terkait dengan keberlanjutan. Jika sebuah perusahaan melakukan aktivitas terkait keberlanjutan tetapi memilih untuk tidak menerbitkan laporan keberlanjutan, hal ini akan sangat merugikan karena pelaporan keberlanjutan memiliki banyak kegunaan (Utami & Septivani, 2023).

Dikutip dari Annur (2023) databoks.katadata.co.id, menurut laporan dari tim ilmuwan *Global Carbon Project*, Indonesia menduduki posisi kedua negara yang menghasilkan emisi karbon terbanyak di dunia dari sektor alih fungsi lahan. Selama periode 2013-2022, Indonesia menghasilkan emisi karbon dari penggunaan alih fungsi lahan rata-rata sebanyak 930 juta ton CO₂ per tahun. Jumlah itu berkontribusi sebanyak 19,9% dari jumlah karbon yang dihasilkan dunia yaitu 4,67

miliar ton CO₂ per tahun. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebanyak 18,3% jumlah emisi karbon yang dihasilkan oleh Indonesia. Peningkatan tersebut merupakan peningkatan terbesar dibandingkan negara-negara lainnya menurut *Global Carbon Project*. Tanpa adanya usaha untuk mengurangi emisi, akan terjadi kemungkinan kenaikan suhu 1,5 derajat di atas pra-industrialisasi dalam waktu tujuh tahun lebih cepat daripada proyeksi pada Laporan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC). Menurut data *European Commission*, volume emisi gas rumah kaca Indonesia pada tahun 2022 mencapai 1,24 gigaton setara karbon dioksida (Gt CO₂e) sekitar 2,3% dari jumlah emisi gas rumah kaca global.

Maka dari itu dibutuhkan upaya untuk mengurangi emisi karbo dan penggunaan kertas dengan cara transformasi digital. Transformasi digital umumnya didasarkan pada konsep perbankan ramah lingkungan yang berfokus pada pengurangan dampak berkelanjutan untuk menetapkan penggunaan sumber daya yang ramah lingkungan. Kegiatan operasional bank mungkin bisa mendukung atau mencegah kerusakan alam, walaupun perbankan tidak berkaitan langsung dengan kegiatan yang merusak alam. Sejalan dengan konsep keberlanjutan GRI, bahwa perusahaan perbankan harus fokus tidak hanya pada tanggung jawab pengelolaan keuangannya bisnisnya dengan cara terbaik untuk menghasilkan keuntungan maksimal (*Profit*) bagi pemegang saham, namun juga pada tanggung jawabnya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan alam semesta (*Planet*) serta kesejahteraan pelanggan (*People*). Ketiga pilar tersebut disebut dengan “*Triple bottom-line of bank responsibility*” (Almi, 2023).

Semakin banyak yang mengimplementasikan pengungkapan transformasi digital maka akan memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan bank. Dengan adanya pengungkapan transformasi digital diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan perbankan sehingga mendorong peneliti untuk menelusuri lebih dalam kondisi keberlanjutan sektor perbankan selama melakukan pengungkapan transformasi digital.

Sektor perbankan harus terus memperhatikan tren perkembangan teknologi khususnya teknologi digital agar dapat membuat strategi yang tepat dan menerapkan prinsip kehati-hatian (*act prudent*) dalam mengambil keputusan. Hal ini juga sangat penting bagi perusahaan untuk menerapkan praktek *corporate governance* dalam mengambil keputusan untuk mengurangi resiko melalui transparansi dan praktik manajemen yang lebih bertanggung jawab (Murti, 2019).

Corporate Governance Disclosure penting bagi setiap perusahaan untuk menjaga keberlanjutan usaha dalam waktu yang panjang. Alasan masih banyaknya perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keberlanjutannya dapat dihubungkan dengan tata kelola perusahaan yang dijalankan. Kinerja perusahaan dapat diukur dari kualitas laporan keberlanjutan yang mereka terbitkan (Ekaputri & Eriandani, 2022).

Dalam penelitian ini menggunakan Perusahaan perbankan. Perusahaan perbankan adalah perusahaan yang bertanggung jawab mengumpulkan dana dari masyarakat dan mendistribusikan kembali ke masyarakat. Bank berfungsi untuk mendukung pembangunan ekonomi suatu negara (Sholikhah & Miranti, 2021). Dikutip dari statista.com jumlah perbankan di Indonesia sejak 2018-2022 mengalami

penurunan. Jumlah bank pada tahun 2018 sebanyak 115 bank. Pada tahun 2019 jumlah bank sebanyak 110 bank mulai menurun. Pada tahun 2020 dan 2021, jumlah bank mencapai 109 bank. Namun pada tahun 2022 jumlah bank terjadi penurunan lagi menjadi 107 bank. Menurunnya jumlah bank menandakan kelangsungan hidup perbankan di Indonesia masih rendah. Hal ini secara signifikan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Jika kondisi perbankan sehat maka perekonomian negara akan baik (Fahrial, 2018). Salah satu cara untuk mengetahui keadaan perbankan sehat adalah dengan melihat laporan keberlanjutan perbankan.

Penelitian Siswanti et al. (2024) menunjukkan bahwa transformasi digital berpengaruh signifikan terhadap bisnis berkelanjutan. Penelitian Anjarwati et al. (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap pelaporan keuangan berkelanjutan, berbeda dengan penelitian Subagyo & Murwaningsari (2023) menunjukkan bahwa digital bank tidak mempengaruhi bank dalam pengungkapan laporan keberlanjutan.

Penelitian Ardiani et al., (2022) menunjukkan bahwa mekanisme *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Sustainability Report*, berbeda dengan Penelitian Al Fatimah & Widiatmoko (2022) menunjukkan *Corporate Governance Efficiency* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Sustainability Report*.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Digital Transformation Disclosure* dan *Corporate Governance Disclosure* terhadap *Sustainability Banking Disclosure*

(Studi pada Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)”).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan pokok dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana *Digital Transformation Disclosure* pada Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022.
2. Bagaimana *Corporate Governance Disclosure* pada Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022.
3. Bagaimana *Sustainability Banking Disclosure* pada Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022.
4. Bagaimana pengaruh *Digital Transformation Disclosure* terhadap *Sustainability Banking Disclosure* pada Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Bagaimana pengaruh *Corporate Governance Disclosure* terhadap *Sustainability Banking Disclosure* pada Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
6. Seberapa besar pengaruh *Digital Transformation Disclosure* dan *Corporate Governance Disclosure* terhadap *Sustainability Banking Disclosure* pada Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *Digital Transformation Disclosure* pada Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022.
2. Untuk mengetahui *Corporate Governance Disclosure* pada Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022.
3. Untuk mengetahui *Sustainability Banking Disclosure* pada Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Digital Transformation Disclosure* terhadap *Sustainability Banking Disclosure* pada Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2018-2022.
5. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Governance Disclosure* terhadap *Sustainability Banking Disclosure* pada Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2018-2022.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Digital Transformation Disclosure* dan *Corporate Governance Disclosure* terhadap *Sustainability Banking Disclosure* pada Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2018-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam dunia akuntansi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pemahaman mengenai *Digital Transformation Disclosure*, *Corporate Governance Disclosure* terhadap *Sustainability Banking Disclosure*.
- b. Memberikan informasi dan referensi dalam penulisan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan *Digital Transformation Disclosure*, *Corporate Governance Disclosure* terhadap *Sustainability Banking Disclosure* serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat memperluas pengetahuan dan pengalaman langsung tentang implementasi laporan keberlanjutan dalam akuntansi.

b. Bagi Perusahaan

Perusahaan sebagai subyek penelitian, diharapkan dapat memperoleh pengetahuan secara langsung mengenai *Digital Transformation Disclosure* pada perkembangan teknologi saat ini, pentingnya menerapkan *Corporate Governance Disclosure* sehingga menghasilkan strategi yang baik dan pentingnya pertanggungjawaban ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan yang diungkapkan pada *sustainability report*.

c. Bagi Investor

Diharapkan investor akan memperhatikan informasi laporan keberlanjutan yang telah dilakukan oleh perusahaan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk menempatkan modalnya pada perusahaan tidak hanya melihat dari kondisi keuangan perusahaan saja.